

Syiah dan Kerukunan Umat

Haider Bagir

Dirut dan Pendiri Mizan, Dosen Pemikiran Islam di Islamic College

Meski sebelumnya pun keadaannya sudah seperti api dalam sekam, peristiwa Sampang telah menyalakan lagi wacana tentang sahsesatnya mazhab Syiah. Seperti sebelum-sebelumnya, umumnya wacana yang berkembang didominasi oleh perdebatan dan saling tuduh yang simpang-siur. Tak sedikit di antaranya mengambil bentuk debat kusir. Yang lainnya dipenuhi upaya-upaya mengajukan bukti-bukti yang selektif dan bias—kutipan-kutipan yang dilepaskan dari konteks, pilihan-pilihan pendapat yang ganjil (*syadz*) atau minoritas dari kalangan Syiah malah tak jarang bercerita tanpa dasar yang dikarang-karang belaka.

Tapi, dalam keadaan-keadaan seperti ini, selalu saja ada suara-suara yang proporsional dan tetap rekonsiliatif, bahkan di antara para pengkritik keras Syiah. Yakni, betapa pun intinya ada yang mengecap apa yang dianggap sebagai kekeliruan keagamaan dan sosial kaum Syiah, insya bersifat nasihat dan tujuannya adalah memelihara kedamaian di antara para pengikut mazhab Ahlus-Sunnah dan Syiah.

Di antara pandangan-pandangan seperti ini adalah pendapat yang dikeluarkan oleh Ustaz Bachtiar Nasir dan para tokoh muda dari INSISTS, yang secara rutin menerbitkan jurnal Islamia, kedua-duanya di harian *Republika*. Lepas dari kemungkinan perbedaan pandangan dan pendapat yang mungkin timbul terhadap tulisan-tulisan yang disebutkan di atas, harus diakui bahwa inti nasihat mereka kepada orang-orang yang mengaku pengikut mazhab Syiah di Indonesia mengandungi kebenaran-kebenaran dan patut dijadikan renungan. Intinya adalah agar setelah memahami bahwa di antara kedua mazhab ada perbedaan-perbedaan pandangan yang sulit atau bahkan tak bisa dipertemukan, para pengikut Syiah di Indonesia tidak sekali-kali berupaya untuk melakukan dakwah Syiah di Indonesia.

Ustaz Bachtiar, setelah menunjukkan perbedaan di antara kedua mazhab dan mengingatkan ke-

salahan upaya dakwah Syiah, menyatakan, “... bekerjasamalah pada hal-hal yang kita sepakati saja dalam hal kedamaian tanpa harus mencederai dasar-dasar akidah yang kita yakini. Juga menghormati wilayah dan etika sosial masing-masing, misalnya tidak saling berhadap-hadapan dalam mengaruhi keyakinan, mencela, dan menyentak. Apalagi, melakukan tindakan kekerasan fisik atau teror mental karena akan berujung pada perkelahian yang merugikan kedua belah pihak.” (*Republika*, 5 Januari 2010).

Sementara itu, Sdr Adian Husaini menutup artikelnya di Jurnal Islamia (*Republika*, Kamis, 19 Januari, hal 23) dengan menyatakan, “Jika kaum Syiah mengakui bahwa kaum Sunni sebagai mazhab dalam Islam, seyogyanya mereka menghormati Indonesia sebagai negeri Islam Sunni. Hasrat mensyiahkan Indonesia bisa berdampak buruk bagi masa depan negeri ini ... itulah jalan damai untuk Muslim Sunni dan kelompok Syiah.”

Penulis artikel ini sepenuhnya setuju dengan pandangan-pandangan ini. Sesungguhnya, inilah jalan yang paling bijaksana. Penulis ingat, dalam suatu pertemuan pribadi penulis dengan Syaikh Ali Tashkhi, seorang ulama terkemuka Iran, salah satu pembantu terdekat Wali Faqih Ayatullah Ali Khamenei, serta wakil Dar al-Taqrin bay al-Madzahib (Perkumpulan Pendekatan antar-Mazhab), ini dengan tegas menyatakan agar hendaknya kaum Syiah di Indonesia meninggalkan sama sekali pikiran untuk mensyiahkan kaum Muslim di Indonesia.

Tiga kelemahan

Lepas dari persoalan di atas, penulis memiliki beberapa catatan yang perlu ditambahkan. Meski dalam banyak hal kecaman terhadap pandangan Syiah itu memiliki dasar-dasar, biasanya ada sedikitnya tiga kelemahan mendasar dalam banyak argumentasi para penganek Syiah. Pertama, generalisasi. Sebagian besar argumentasi para penganek Syiah menggunakan metode memilih bahan-bahan tertentu atau pandangan-pandangan khas anasir penulis dan ulama dari kalangan Syiah dan kemudian menggeneralisasikannya atas pendapat kaum Syiah seluruhnya. Contoh yang jelas adalah tuduhan yang diulang-ulang bahwa Syiah memiliki Alquran yang berbeda dengan kaum Sunni.

Tak dapat dipungkiri bahwa ada anasir ulama Syiah di berbagai zaman yang mempercayai dan berargumentasi tentang hal ini. Tetapi, dengan mudah dapat dibuktikan bahwa ini adalah pandangan yang tidak diterima secara luas di kalangan Syiah. Juhur ulama Syiah—dengan pengecualian pandangan yang ganjil (*syadz*) di antara mereka—sepakat bulat bahwa Alquran mushaf Utsmani yang ada sekarang ini lengkap dan sempurna. Pun, semua orang yang mengenal para pemeluk Syiah dan pernah bepergian ke berbagai negeri Syiah tahu bahwa Alquran yang mereka baca 100 persen sama kandungannya dengan yang kita baca.

Kedua, tidak terpeliharanya keseimbangan pandangan. Masih mengambil contoh Alquran, di dalam khazanah Sunni bukannya tak ada bahan yang mengandungi pernyataan bahwa Alquran yang kita baca ini sesungguhnya tidak lengkap. Ambil saja beberapa hadis dalam beberapa kitab sahih yang menyatakan hilangnya satu ayat yang hanya ada di simpanan Siti Aisyah karena dimakan kambing.

Atau, pernyataan Sayidina Umar mengenai ayat tentang rajam yang hilang dalam Alquran yang kita baca sekarang. Dan, beberapa hadis lain. Juga bukan tak ada ulama besar Sunni, termasuk ibn Hajar al-Asqalani, Ibn Hajar al-Haytami, Imam Syafi'i, dan beberapa yang lainnya, yang menuliskan pandangan adanya perubahan/keketidakkengkapan (tahrif) dalam Alquran.

Sudah tentu, betapa pun hadis-hadis itu terdapat dalam sahih dan bahwa yang menuliskan adalah para ulama besar, tak satu pun orang di kalangan kaum Sunni yang menerima pandangan ini. Cara berpikir yang sama tentunya perlu juga dipertimbangkan jika kita membaca bahan-bahan sedemikian di kalangan Syiah.

Sedang dalam tindakan mengecap sahabat, para *mu'arrikh* Sunni pun mencatat bahwa selama 80 tahun kekuasaan Bani Umayyah sampai masa Khalifah Umar bin 'Abdul-'Aziz, Sayidina Ali bin Abi Thalib dikutuk di mimbar-mimbar Jumat. Ini baru berakhir ketika Khalifah Umar menghentikan praktik ini dan memerintahkan agar para khatib membaca Alquran surah 16 ayat 90 sebagai pengantinya (dicatat, antara lain, oleh Ibn Atsir dari ulama lampau dan Abul-'A'la al-Maududi dari ulama

modern). Tentu, kenyataan ini sama sekali tak dapat digeneralisasikan sedemikian untuk kemudian menyatakan bahwa para pengikut mazhab Ahlus-Sunnah adalah pengecam Sayidina Ali.

Ketiga, kurangnya perhatian pada perkembangan pandangan yang terjadi dalam mazhab apa pun, dalam hal ini mazhab Syiah. Contohnya, adalah benar pernyataan adanya kecenderungan di kalangan Syiah tertentu untuk mengecap sahabat-sahabat Nabi SAW, termasuk Sayidina Abubakar, Sayidina Umar, dan Sayidina Utsman, serta sebagian istri Nabi. Namun, sebelumnya perlu ditegaskan bahwa Syiah Zaydiyah, meski menganggap Sayidina Ali lebih utama (*afdhul*), menerima kekhalfahan serta menghormati ketiga sahabat besar itu. Sementara itu, banyak ulama Syiah Imamiyah atau Itsna 'Asyariyah yang telah merevisi pandangannya tentang ini. Hasil konferensi Majma' Ahl al-Bayt di London pada 1995, misalnya, dengan tegas menyatakan menerima keabsahan kekhalfahan tiga khalifah terdahulu sebelum Khalifah Ali.

Bahkan, terkait dengan skandal pengutukan sahabat besar dan sebagian istri Nabi yang dilakukan oleh oknum Syiah yang tinggal di Inggris, bernama Yasir al-Habib, Ayatullah Sayid Ali Khamenei sendiri mengeluarkan fatwa yang dengan tegas melarang penghinaan terhadap orang-orang yang dihormati oleh para pemeluk Ahlus-Sunnah (fatwa ini tersebar dan dapat dengan mudah diakses dari berbagai sumber). Di antara isinya adalah, “Diharamkan menghina figur-figur/tokoh-tokoh (yang digambarkan) saudara-saudara seagama kita, ahlus-Sunnah, termasuk tuduhan terhadap istri Nabi SAW dengan hal-hal yang mencederai kehormatannya mereka...”

Akhirnya, hendaknya para pemimpin umat dari berbagai kelompok dapat meniadakan sikap-sikap bijak para tokoh dan pemimpin yang mempromosikan cara pandang yang proporsional terkait konflik-konflik antarmazhab Islam. Khusus untuk orang-orang yang pandangannya didengar oleh para pengikut Syiah di negeri ini, hendaknya mereka meyakinkan para pengikutnya untuk dapat membawa diri dengan sebaik-baiknya serta mengutamakan persaudaraan dan toleransi terhadap saudara-saudaranya yang merupakan mayoritas di negeri ini. ■

Tajuk

Mengatasi Perlambatan Ekonomi

Perekonomian global pada 2012 ini tidak menunjukkan pertanda membaik. Bahkan, Bank Dunia mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi global, dari yang tadinya diprediksi 3,6 persen dipangkas menjadi 2,5 persen. Tahun ini akan menjadi tahun sulit bagi perekonomian dunia.

Apakah perlambatan ekonomi global itu berpengaruh terhadap Indonesia? Pasti. Hanya, seberapa besar pengaruhnya, itu yang harus dihitung dengan cermat, termasuk bagaimana mengantisipasinya agar pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga, bahkan kalau bisa lebih tinggi. Ini yang dibicarakan dalam sidang kabinet paripurna dua hari silam.

Ketika terjadi krisis di Amerika yang menyebabkan krisis global, pertumbuhan ekonomi dunia anjlok menjadi minus 2,3 persen. Indonesia masih beruntung karena permintaan domestik masih tinggi. Pertumbuhan ekonomi masih bisa mencatatkan hasil positif 4,2 persen. Keberhasilan lolos dari krisis global itu menjadi bekal untuk menghadapi pelemahan ekonomi dunia pada 2012 ini.

Beruntung kita sudah menjadi negara yang memiliki peringkat dan masuk dalam *investment grade* dari Fitch. Moody's juga menaikkan *rating* kita satu tingkat. Pengakuan dari lembaga keuangan itu menjadi angin segar bagi Indonesia karena kita akan lebih mudah menarik investasi asing. Jika investasi asing dominan pada sektor riil, akan menjadi daya dorong pertumbuhan ekonomi.

Tapi, sebetulnya Indonesia memiliki daya dorong yang luar biasa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yakni dari APBN. Dengan APBN 2012 senilai Rp 1,435 triliun, Indonesia bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari prediksi tahun ini yang 6,5 persen. Dengan catatan bahwa APBN tersebut tepat sasaran dan dengan penyerapan sempurna.

Jika kita lihat dalam APBN tahun-tahun sebelumnya, banyak anggaran yang tidak pada tempatnya. Kasus yang hebat, misalnya, untuk menyervis anggota DPR, hanya untuk merenovasi ruangan dibutuhkan dana Rp 20,3 miliar, pengadaan kalender Rp 1,3 miliar, renovasi toilet Rp 2 miliar, dan masih banyak lagi anggaran yang tidak pantas. Begitu juga iklan-iklan dari kementerian yang lebih banyak buang duitnya.

Selain itu, penyerapan anggaran juga rendah. Tahun lalu penyerapan anggaran sekitar 85 persen sangat tidak profesional. Celakanya lagi, anggaran yang tak terserap itu justru berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, seperti infrastruktur.

Semestinya, anggaran sebagian besar dialokasikan untuk infrastruktur yang kondisinya sangat memprihatinkan. Proyek infrastruktur ini selain akan mendorong pertumbuhan juga mereduksi pengangguran karena membuka lapangan kerja yang besar. Dengan anggaran yang baik dan tanpa korupsi, jalan raya di pantura, misalnya, tidak menjadi proyek abadi.

Pemerintah juga harus berani mengurangi secara drastis pada sektor yang sebetulnya tidak perlu disubsidi. Bayangkan untuk subsidi BBM saja sudah mencapai Rp 120 triliun, sementara pemerintah hanya bisa menggeluhkan kondisi itu dan menyalahkan rakyat mengapa tidak pakai BBM nonsubsidi.

Perekonomian global boleh terpuruk, tapi ketika kita punya modal untuk mengatasi keterpurukan global, tidak perlu terlalu khawatir. Modal kita adalah konsumsi dalam negeri yang terus naik. Modal lain adalah APBN yang jika dialokasikan secara tepat pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan tidak dikorupsi, akan menjadi faktor melejitnya pertumbuhan ekonomi. ■

:: suarapublika ::

Lotte Mart Ratu Plaza

Mobil Pengunjung Dibobol Maling

Pada Rabu, 21 Desember 2011, pukul 13.30 WIB, saya dan istri saya yang sedang hamil tujuh bulan berbelanja keperluan bulanan di Lotte Mart. Saya memarkir mobil di *basement* dekat dengan pos keamanan. Kemudian, selesai berbelanja kami kembali ke mobil sekitar pukul 14.30 WIB dan kami mendapatkan pintu mobil CRV di sisi kanan depan sudah tidak terkunci dengan lubang kunci pada pintu rusak juga pada lubang *stater* mobil sudah dirusak.

Setelah diteliti, ternyata seorang mengambil satu *head unit* TV/DVD *player*, dua laptop, dan satu tas kerja saya yang berisi dokumen-dokumen sangat penting. Saat itu kami langsung melaporkan hal tersebut kepada pihak sekuriti, tapi respons yang kami terima sangat tidak memuaskan. Sempat ada tiga orang satpam yang datang melihat, tapi hanya satu orang yang mendampingi kami, bernama Pak Andi.

Pihak keamanan cenderung cuci tangan dan justru menyalahkan kami seakan-akan kami tidak mengunci mobil dan mempersulit kami sewaktu hendak memeriksa CCTV dengan berbagai alasan, seperti prosedur perlu waktu tiga hari untuk bisa dilihat, tiga hari kemudian libur panjang, dan lain-lain.

Kami akhirnya memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanah Abang untuk membuat berita acara pemeriksaan (BAP) guna melanjutkan kasusnya melalui jalur hukum yang berlaku. Sehari setelah kejadian itu, kami mendatangi pengelola gedung di lantai 17, yaitu PT Ratu Sayang International. Ternyata, dugaan kami benar, mereka tidak tahu sama sekali tentang kejadian yang menimpa kami kemarin. Tidak ada laporan apa pun dari pihak pos keamanan di *basement*.

Setelah menunggu kurang lebih 20 menit, akhirnya kami ditemui oleh Bapak Eri (*fit one manager*) dan satu orang perwakilan pihak keamanan. Mereka berjanji untuk datang ke kantor saya besok, 23 Desember 2011, dengan alasan menunggu kehadiran manajer sekuriti (Jan Poluan).

Tapi, nyatanya tanggal 18 Januari 2012, tidak ada kabar apa pun mengenai janji mereka untuk datang dan tidak adanya itikad baik sama sekali dari pihak mereka untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan yang mereka janjikan. Total kerugian kami minimal Rp 49 juta (di luar kerusakan pada kendaraan yang diasuransikan) tidak sebanding bila dibandingkan dengan rasa trauma dan kecewa kami terhadap pelayanan dan tanggung jawab dari pihak PT Ratu Sayang International selaku pengelola gedung, PT AGN, pihak *security service*.

Donny Prima Setyadjii

Taman Lebak Bulus, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan

SDN Depok Baru 1

Satu Semester tanpa Pelajaran Agama Islam

Kabar menyedihkan ini berasal dari SDN Depok Baru 1 Kota Depok. Pada semester pertama tahun ajaran 2011-2012, sekolah ini tidak melakukan pengajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), bahkan sampai surat ini dibuat tanggal 18 Januari 2012. Ini disebabkan oleh guru PAI yang semula telah diangkat menjadi kepala sekolah di SDN yang lain oleh Dinas Pendidikan Kota Depok. Sedangkan, Dinas Pendidikan belum memberikan guru pengantinya.

Melalui Surapublika ini, saya menyenarkan kepada Dinas Pendidikan Kota Depok agar lebih tertaha dalam pemberdayaan guru PNS atau honorer guna mengaktifkan kegiatan belajar mengajar (KBM). Juga kepada lulusan ilmu keguruan PAI dari Universitas Islam Negeri/UIU untuk mencoba mengajukan surat lamaran pekerjaan di SDN Depok Baru 1 sebagai guru honorer.

Yudhi Dwi Pradana

Kelurahan Depok Jaya, Pancoranmas, Kota Depok 16432

Husni Arifin

Mantan Wartawan dan Pekerja Sosial di Aceh

Siaapa pun pelaku dan sponsornya, aksi kekerasan bersenjata di Aceh jelas sekali bertujuan merusak perdamaian yang sudah berjalan lebih dari lima tahun. Mereka ingin mengembalikan Aceh ke situasi konflik. Asumsi ini berdasarkan sejumlah pesan yang sengaja diciptakan oleh para pelaku untuk menggiring ingatan publik pada situasi dan kondisi Aceh saat konflik dulu.

Pertama, pada beberapa pemembakan terakhir, sasaran ditujukan kepada warga non-Aceh yang sedang mencari nafkah di Aceh. Lokasinya di berbagai daerah, secara serempak. Propaganda kebencian dari kelompok tertentu terhadap etnis dan suku lain di Aceh, terutama Jawa, dilakukan di masa lalu. Saat itu, mereka menuding warga pendatang sebagai bagian dari misi Jakarta untuk menguasai Aceh. Akibatnya, terjadi pengusiran orang-orang Jawa di sejumlah daerah di Aceh, termasuk pemukiman transmigran.

Kedua, para pelaku menggunakan simbol kekuatan dalam konflik, yaitu senapan mesin dan granat, guna mengintimidasi publik awam. Mereka ingin mengirim pesan intimidasi bahwa pemeang senjata masih ada di mana-mana, seperti dulu. Pemegang senjatalah yang berkuasa, bukan aparat pemerintah, bukan ulama, bahkan bukan pula aparat keamanan berseragam.

Ketiga, kekerasan bersenjata ini dilakukan secara senyap, mis-

terius. Ini juga marak terjadi di masa konflik dan langsung mengingatkan masyarakat pada OTK alias orang tak dikenal sebagai pelakunya. Hingga kini, hampir-hampir fenomena OTK waktu itu tak pernah bisa diungkap siapa sebenarnya mereka.

Peran pilkada

Siaapa pun pelaku kekerasan bersenjata dan sponsornya, mereka memanfaatkan benar situasi dan kondisi yang ada saat ini di Aceh. Masa perdamaian masih terlalu muda dan rawan guncangan. Sementara itu, belum semua lapisan masyarakat merasakan hasil pembangunan pascakonflik. Terlepas dari soal rangkaian penembakan gelap yang terjadi, situasi dan kondisi Aceh memang belum mampu memberikan kestabilan politik dan ketahanan sosial masyarakat setempat.

Secara politik, Aceh sedang panas menjelang Pilkada, Februari 2012. Faktanya, ada pertikaian politik yang tengah terjadi, yang melibatkan para politikus mantan pimpinan GAM. Gubernur *incumbent* akan mencalonkan lagi dari jalur independen atau perseorangan. Sementara itu, Partai Aceh yang menjadi mayoritas dalam Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRa) mempersoalkan pencanangan Pasal 256 UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang mengatur soal pembatasan calon perseorangan. Partai bentukan para pimpinan GAM itu menolak adanya calon perseorangan. Mereka menuntut adanya qanun Pilkada lebih dulu sebagai landasan pelaksanaan Pilkada. Akhirnya, PA memutuskan tidak mengikuti Pilkada.

Ribut-ribut jelang Pilkada ini pula yang semakin menunjukkan

kepada publik adanya pertikaian di antara para elite mantan GAM. Terpilihnya Irwandi yang bukan pimpinan lapangan ataupun dipilomasi GAM di masa konflik sebagai Gubernur Aceh adalah di luar skenario. Kini, Irwandi kembali akan mencalonkan diri sebagai calon perseorangan karena tak didukung PA. Suatu manuver politik pun terjadi agar calon perseorangan bisa lolos, meski UU Pemerintahan Aceh membatasinya.

Secara ekonomi sosial, pembangunan Aceh hingga saat ini belum juga mampu mengantar provinsi itu sejajar dengan provinsi lainnya. Sebagian dari penduduk yang kurang beruntung adalah para mantan kombatan GAM. Sementara itu, korupsi di kalangan pejabat disinyalir tetap marak meskipun pimpinan daerah sudah berganti sejak era Gubernur Abdulah Puteh. Lalu, apa tujuan para pelaku kekerasan ini?

Konflik, di mana pun di seluruh dunia, memberikan kesempatan kepada pihak tertentu untuk mengeruk keuntungan dari daerah itu. Ketika konflik berhenti dan perdamaian datang, maka tertutup pula kesempatan mencuri harta rakyat daerah konflik.

Pertikaian elite

Karena itulah, perdamaian, yang sudah berjalan selama lima tahun sebagai buah kesepakatan damai antara pemerintah RI dan GAM memang sangat mahal dan sekaligus sensitif. Salah penanganan bisa-bisa memicu keteringgungan pihak-pihak pelaku perdamaian. Karena itu, kejujuran dalam melihat kasus ini sangat diperlukan agar penanganan masalah bisa dipahami semua pihak.

Marilah jujur, komitmen semua pihak untuk berdamai adalah se-

Pemimpin Redaksi: Nashihin Masha. Wakil Pemimpin Redaksi: Arys Hilman Nugraha.

Redaktur Pelaksana: Eiba Damhuri. Kepala Newsroom: M Iwan Arielyanto. Kepala Republika Online: Agung Pragitya Vazza. Redaktur Senior: Anji Punto Utomo. Wakil Redaktur Pelaksana: Irfan Jumaldi, Syahruddin El-Fiki, Kumara Dewastana, Asisten Redaktur Pelaksana: Budiramananta, Joko Siding, Teguh Hutanjati, Subroto. Reporter Senior: Andi Nur Anilahan, Harun Hussein, Muhammad Subarkah, Nurul S Hamami, Selamat Ginting, Teguh Samudra. Staf Redaksi: Abdullah Sammy, Agus Yulianto, Ali Shahab, Asep K. Nurzaman, Andri Saubani, Anjar Fahmiarta, A Syalaby Ichsan, Bilal Ramadnan, Budi Rahajog, Burhanuddin Dillah, Citra Lisyta Rini, Damanhuri Zuhri, Darmawan Septriosya, Darmawan, Desy Susilawati, Dewi Mardiani, Didi Purwadi, Doko Sueno, Dyah Ratna Meta Nova, Edi Setyoko, Edwin Dwi Putranto, Eko Widayanto, Endro Yuwanto, Erdy Nasrul, Esthi Maharani, Efi Ismail, Ferman Rahadi, Ferry Kislihandi, Firkah Fansuri, Fitriya Andayani, Fitriyan Zamzami, Heri Purwata, Heri Ruslan, Ichsan Emerald Alamsyah, Hedi Wulandari, Indira Rezkisari, Iwan Kelana, Israr, Johar Anief, Khoirul Azwar, Lilis Sri Handayani, Mansyur Faqih, Mohammad Akbar, Mohamad Amin Madani, Muhammad Fakhruddin, M As'adi, M Hafri, M Ihsan Shiddiqey, Natalia Endah Hapsari, Neni Ridwaning, Nadia Zuraya, Nina Chairani Ibrahim, Palupi Anisul Ulama, Prima Restu Luffdiani, Priyanto Oemar, Rachmat Santosa Basarrah, Rahmat Budi Harto, Ratna Puspipta, Reiny Dwiananda, Rusdy Nurdiansyah, R Hiru Muhammad, Sefi Oktarianisa, Setyanawidita Livkancansera, Suli Tri Puji Budiwati, Stevy Maradona, Susie Evidia Vuididanti, Taufiqurrahman Bachdri, Teguh Fikriansyah, Wachidah Handasah, Wulan Tunjung Palupi, Yeyen Restiyani, Yoebal Ganeshsa Rasyid, Yogi Ardhi Cahyadi, Yulianingsih, Yusuf Assidiq, Zaky Al Hamzah.

Kepala Quality Control dan Bahasa: Rakhmat Hadi Supctio. Kepala Desain: Sarjono. Kepala Perwakilan Jawa Barat: Maman Sudiaman. Pjs Kepala Perwakilan DIY - Jateng & Jatim : Haryadi B.Susanto. Nian Pololan (Medan), Maspril Ariess (Palembang), Ahmad Baraas (Bali). Sekretaris Redaksi: Fachru Ratu.

Penerbit: PT Republika Media Mandiri. Alamat Redaksi: Jl. Warung Buncit Raya No. 37, Jakarta 12510. Alamat Surat: PO Box 1006/JKS-Jakarta 12010. Tel: 021-780.3747 (Hunting), Fax: 021-780.0649 (Seluruh Bagian). Fax Redaksi: 021-798.3623. E-mail: sekretariat@republika.co.id. Bagian Iklan: Jl. Warung Buncit Raya No. 37, Jakarta 12510. Tel: 021-794.4693. Fax: 021-798.1169. Sirkulasi dan Langganan: Tel: 021-791.98441. Fax: 021-791.98442. Online: http://www.republika.co.id. Alamat Perwalian Bandung: Jl. Mangga No. 37 Bandung 40114 Tel: 022-87243363-65. Fax: 022-7271384. Yogyakarta: Jl. Perahu No. 4, Kota Baru, Tel: 0274-544.972, 566028. Fax: 0274-541.582. Surabaya: Jl. Barata Jaya No. 51. Tel: 031-501.7409. Fax: 031-504.5072.

Direktur Utama: Erick Thohir.

Wakil Direktur Utama: Daniel Wevengking. Direktur Pemberitaan: Ikhwanul Kiram Mashuri. Direktur Operasional: Tommy Tamtomo. GM Keuangan: Didik Irianto. GM Marketing dan Sales: Yulianingsih. Manajer Iklan: Andri Wisnu Wardhana. Manajer Produksi: Nurrokhim. Manajer Sirkulasi: Darikman Ruminta. Manajer Keuangan: Hery Setiawan.

Harga Langganan: Rp. 69.000 per bulan, harga eceran Pulau Jawa Rp 2.900. Harga Eceran Luar Jawa: Rp. 4.000 per eksemplar (tambah ongkos kirim). Rekening Bank a.n PT Republika Media Mandiri: Bank BSM, Cab. Warung Buncit, No. Rek. 0030113448 (Bank Mandiri, Cab. Warung Buncit, No. Rek. 127004240642 (Bank Lippo, Cab. Warung Buncit, No. Rek. 727.30.028988 (Bank BCA, Cab. Graha Inti Fauzi, No. Rek. 375.305.666.8. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 283/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1992. Anggota Serikat Penerbit Surat Kabar: Anggota SPS No. 163/1993/11/A/2002.

HARIAN
REPUBLIKA
MAHAKA MEDIA

Semua naskah yang dikirim ke Redaksi dan ditiriskan menjadi milik Harian Republika. Semua wartawan Harian Republika dibekali tanda pengenal dan tidak menerima maupun meminta imbalan dari siapa pun. Semua isi artikel/tulisan yang berasal dari luar, sepenuhnya tanggung jawab penulis yang bersangkutan. Semua isi artikel/opini yang terdapat di sampul depan, menjadi tanggung jawab Kepala Perwakilan Daerah bersangkutan.